

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG MENERBITKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINDUK KAMPUNG ADAT SEMPURMAYUNG

Wiwik Roso Sri Rejeki¹, Imelda Hutasoit², Indramayu³

^{1,2,3}Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, Indonesia

Email: wiwik@ipdn.ac.id

Abstrak

Penelitian bertujuan menganalisis strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan (adminduk) di Kampung Adat Sempurmayung, Desa Cimarga, Kecamatan Cisitu. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelayanan administrasi kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan utama pelayanan adminduk meliputi regulasi yang jelas, inovasi pelayanan melalui Program Sapa Warga dan Predator, serta ketersediaan data kependudukan yang terintegrasi. Sedangkan kelemahan yang dihadapi mencakup keterbatasan akses geografis, sarana dan prasarana yang belum memadai, rendahnya pemahaman administrasi kependudukan, literasi digital masyarakat, serta keterbatasan SDM yang kompeten. Peluang yang tersedia berupa dukungan program Desa Cimarga dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan. Adapun ancaman yang dihadapi meliputi ketergantungan pada dokumen fisik, risiko kebocoran data pribadi, dan keterbatasan anggaran pelayanan. Berdasarkan hasil analisis SWOT, dirumuskan strategi yaitu penguatan kolaborasi pemerintah desa dan Disdukcapil, optimalisasi layanan jemput bola, peningkatan literasi masyarakat, percepatan digitalisasi layanan, perlindungan data pribadi, penguatan kapasitas SDM, optimalisasi anggaran dan infrastruktur pelayanan. Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan inklusivitas, efektivitas, dan keberlanjutan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat rentan adminduk.

Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Penduduk Rentan Adminduk, Strategi SWOT.

Abstract

This study aims to analyze the strategy of the Sumedang Regency Government in issuing population administration documents for vulnerable population administration groups in Sempurmayung Traditional Village, Cimarga Village, Cisitu District. The study employed a descriptive qualitative method, with data collected through observation, interviews, and documentation. Data were analyzed using the SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) framework to identify internal and external factors affecting population administration services. The findings indicate that the main strengths of population administration services include clear regulations, service innovations through the Sapa Warga and Predator programs, and the availability of integrated population data. Meanwhile, the weaknesses consist of limited geographical accessibility, inadequate facilities and infrastructure, low public understanding of population administration, limited digital literacy, and a shortage of competent human resources. Available opportunities include support from Cimarga Village programs and increasing public awareness of the importance of population administration documents. The threats faced include dependence on physical

documents, the risk of personal data breaches, and limited service budgets. Based on the SWOT analysis, several strategies were formulated, including strengthening collaboration between the village government and the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil), optimizing mobile outreach services, improving public literacy, accelerating service digitalization, enhancing personal data protection, strengthening human resource capacity, and optimizing budget allocation and service infrastructure. These strategies are expected to improve the inclusiveness, effectiveness, and sustainability of population administration services for vulnerable population groups.

Keywords: *Population Administration, Vulnerable Population Administration Groups, SWOT Strategy.*

A. PENDAHULUAN

Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Rentan Adminduk) merupakan Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan, seperti penduduk yang memiliki kesulitan atau hambatan baik dari sisi sosial, ekonomi, fisik, mental, geografis dan lainnya (Permendagri Nomor 96 Tahun 2019). Penduduk rentan adminduk meliputi korban bencana alam, korban kerusakan sosial, orang terlantar (tuna wisma, anak jalanan, disabilitas, ODGJ, dan transgender), komunitas terpencil, penduduk yang menempati kawasan hutan, tanah negara dan atau tanah dalam kasus pertanahan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat belum memperoleh pengakuan administratif yang memadai sehingga berpotensi mengalami eksklusi dari berbagai layanan publik dan program pemerintah (Yanti 2024). Pendataan penduduk rentan adminduk perlu dilakukan, bukan hanya terkait administrasi saja tetapi juga soal pengakuan hak, pemerataan akses, dan pemberdayaan sosial yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat, sehingga program bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial dapat disalurkan secara lebih optimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok rentan memperoleh akses yang setara terhadap layanan administrasi kependudukan melalui berbagai inovasi pelayanan, termasuk program jemput bola dan pelayanan langsung kepada masyarakat yang sulit menjangkau kantor pelayanan kependudukan (Novita & Tristiana 2022). Akurasi data menjadi dasar penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan mengurangi risiko *exclusion error* maupun *inclusion error* dalam kebijakan sosial. World Bank menemukan bahwa sistem identitas dan data kependudukan yang baik berkontribusi terhadap efektivitas pelayanan publik dan peningkatan inklusi sosial (World Bank 2021). Penelitian oleh United Nations Development Programme menjelaskan bahwa data kependudukan yang mutakhir menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan dan pemberian layanan publik yang inklusif (United Nations Development Programme 2021).

Dalam konteks administrasi publik, akurasi data penduduk rentan adminduk juga membantu pemerintah menyusun kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat (*evidence-based policy*), sehingga intervensi sosial dapat dilakukan secara lebih responsif dan berkeadilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas data kependudukan yang baik berkontribusi terhadap efektivitas implementasi kebijakan sosial dan penguatan tata kelola pelayanan bagi kelompok rentan (Syadzily and Mulazid 2025). Namun demikian, dalam pendataan penduduk rentan adminduk, berbagai permasalahan menghambat proses pendataan sehingga tidak optimal. Hambatan tersebut antara lain kondisi geografis, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses informasi, kondisi kemiskinan, serta minimnya infrastruktur pelayanan bagi masyarakat di daerah terpencil masih menjadi faktor utama yang menyebabkan kelompok rentan belum memiliki dokumen kependudukan secara lengkap (Bima Dwiyastra 2024). Dampak dari belum memiliki dokumen kependudukan, mereka sering kali tidak

tercatat dalam sistem administrasi negara dan berisiko tidak terjangkau oleh program pembangunan maupun bantuan pemerintah (Mulyanto, A, Kadir, and Isnaini 2018). Oleh karena itu, pendataan penduduk rentan adminduk menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan akses pelayanan publik, perlindungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Selain itu, hambatan lain yang sering terjadi adalah adanya resistensi sosial dimana mereka merasa curiga terhadap pemerintah atau merasa takut untuk terdaftar karena alasan privasi atau stigma sosial (United Nations Development Programme 2021).

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu wilayah dimana terdapat penduduk rentan adminduk yaitu masyarakat Kampung Adat Sempurmayung, Desa Cimarga, Kecamatan Cisitu, yang secara geografis kawasan ini berada di daerah pegunungan yaitu berada di kaki Gunung Lingga yang masih dikelilingi oleh alam yang relatif asri dan alami. Kondisi akses jalan menuju wilayah tersebut masih berupa jalan tanah berbatu, berkelok, serta memiliki medan menanjak dan menurun yang cukup curam menyebabkan mobilitas masyarakat menjadi terbatas. Kondisi geografis dimana masyarakat Kampung Adat Sempurmayung tersebut tinggal cukup sulit untuk dijangkau, sehingga kesulitan mengakses layanan adminduk dan juga mempersulit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumedang untuk memberikan pelayanan adminduk, sehingga berdampak pada rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan yaitu pengurusan KTP-el, Kartu Keluarga, dan dokumen pencatatan sipil lainnya. Hambatan infrastruktur dan jauhnya jarak pelayanan menjadi kendala utama masyarakat pedesaan dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan (Sihombing 2021). Untuk mengatasi hambatan tersebut, beberapa daerah melakukan pelayanan jemput bola dan pelayanan berbasis komunitas dalam meningkatkan akses dokumen kependudukan bagi kelompok rentan adminduk.

Disdukcapil Kabupaten Sumedang melakukan inovasi pelayanan administrasi kependudukan secara daring untuk meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi lokasi tempat tinggal masyarakat Kampung Adat Sempurmayung yang berada di kawasan pegunungan dan relatif terpencil menjadi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring, masyarakat mengalami kesulitan mengakses jaringan internet maupun perangkat teknologi yang memadai. Keterbatasan infrastruktur digital di daerah terpencil merupakan faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi *e-government* dan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi, sehingga pelayanan publik masih menghadapi berbagai kendala dalam aspek aksesibilitas, efisiensi, dan pemerataan layanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan adminduk di Kampung Adat Sempurmayung. Penelitian ini menggunakan teori dari Andrews (1971), yang berpendapat bahwa strategi merupakan proses yang diawali dengan penetapan misi dan tujuan organisasi. Selanjutnya analisis menggunakan SWOT untuk menilai kondisi internal berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*), serta kondisi eksternal berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT sebagai landasan dalam memastikan strategi dan menjadi salah satu senjata jitu yang digunakan oleh organisasi, perusahaan, ataupun lembaga pemerintahan untuk memastikan pemecahan terbaik dalam menghadapi tantangan serta hambatan dan kasus (Andrews R. Kenneth 1971). Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada analisis strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan adminduk di Kampung Adat Sempurmayung dengan mengintegrasikan dimensi geografis, sosial budaya, dan tata kelola pelayanan administrasi kependudukan, sehingga menghasilkan rumusan strategi pelayanan yang adaptif terhadap karakteristik

masyarakat adat dan wilayah sulit dijangkau serta dapat menjadi model penguatan pelayanan administrasi kependudukan bagi kelompok rentan di daerah lain.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Strategi menurut Kenneth R. Andrews (1971) adalah proses yang melibatkan penentuan misi dan tujuan perusahaan, analisis mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal, serta pencapaian keselarasan antara elemen-elemen ini. Analisis SWOT menjadi salah satu senjata jitu yang digunakan oleh organisasi, perusahaan, ataupun lembaga pemerintahan buat memastikan pemecahan terbaik dalam menghadapi tantangan serta hambatan dan kasus (Andrews R. Kenneth, 1971). Adapun alat yang digunakan dalam analisis SWOT ini adalah matriks SWOT, yaitu suatu matriks yang menyusun faktor-faktor strategis organisasi untuk mengembangkan empat tipe strategi yaitu:

1. *Strategi SO (Strength-Opportunity)*, yaitu menggunakan kekuatan internal perusahaan/organisasi untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar perusahaan/organisasi.
2. *Strategi WO (Weakness-Opportunity)*, yaitu strategi untuk memperkecil kelemahan internal yang ada pada perusahaan/organisasi dengan memanfaatkan peluang perusahaan/organisasi yang ada.
3. *Strategi ST (Strength-Threat)*, melalui strategi ini perusahaan/organisasi berusaha untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal.
4. *Strategi WT (Weakness-Threat)*, yaitu teknik untuk bertahan dengan cara mengurangi kelemahan internal perusahaan/organisasi serta menghindari ancaman eksternal.

Beberapa penelitian terdahulu terkait penduduk rentan adminduk menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan masih dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya masyarakat adat, terutama kuatnya adat istiadat dan rendahnya kesadaran akan pentingnya administrasi kependudukan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya memerlukan perbaikan teknis, tetapi juga pendekatan kultural, edukasi berkelanjutan, dan kolaborasi dengan tokoh adat agar kepemilikan dokumen kependudukan dapat meningkat secara berkelanjutan (Rafi Pratama 2023). Selanjutnya penelitian terkait pelayanan penerbitan dokumen kependudukan kepada penduduk Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari, perlu untuk memperkuat pelayanan jemput bola, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh adat, memperbaiki sarana-prasarana pelayanan, serta melakukan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat Suku Anak Dalam mengenai pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan (Bima Dwiyastra 2024). Penelitian terhadap anak terlantar oleh Ana Khoirina Sonhaji (2024) menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak identitas anak terlantar dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dan terintegrasi, dengan mengoptimalkan sinergi antara Dinas Sosial, Disdukcapil, lembaga pengasuhan anak, dan instansi terkait. Strategi tersebut cukup efektif dalam meningkatkan kepemilikan identitas hukum anak terlantar, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan data identitas anak, kompleksitas proses administrasi, dan kebutuhan akan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat. Penelitian tersebut berfokus pada kualitas pelayanan, implementasi kebijakan, dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan, sedangkan dalam penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan adminduk di Kampung Adat Sempurmayung, dengan mengintegrasikan dimensi geografis, sosial budaya, dan tata kelola pelayanan administrasi kependudukan.

C. METODE

Penelitian menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif yang menggambarkan permasalahan peristiwa melalui responden ataupun sumber data lainnya yang terkait dengan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konteks, proses, serta makna yang melekat pada fenomena sosial yang diteliti melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi (Creswell & Creswell, 2023). Sumber data diperoleh dari data primer kualitatif dan data sekunder. Data primer kualitatif diperoleh melalui observasi, dengan observasi peneliti dapat menemukan hal-hal yang diluar persepsi informan, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Melalui pengamatan di lapangan, peneliti tidak hanya mengumpulkan data yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti. Selain observasi, pengumpulan data primer kualitatif juga dilakukan melalui metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara langsung, untuk memperoleh informasi yang terperinci mengenai gambaran bagaimana Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Adminduk Di Kampung Adat Sempurmayung. Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan terkait dengan berbagai gambaran dan masalah serta berbagai dokumentasi pendukung lainnya yang dapat digunakan sebagai penunjang dan referensi dalam penelitian ini sehingga dapat melihat berbagai gejala atau keadaan mengenai gambaran bagaimana Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Adminduk di Kampung Adat Sempurmayung. Dalam menentukan informan menggunakan *purposive sampling* dan teknik *snowball* (Sugiyono 2020). Informan yang terpilih merupakan orang-orang kunci (*key person*) dan sumber atas fenomena yang diteliti, terdiri dari pejabat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tokoh masyarakat dan masyarakat Kampung Adat Sempurmayung yang telah dan yang belum mengurus dokumen kependudukan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini menggunakan Analisis SWOT yakni mencakup upaya-upaya untuk mengenali *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman) yang menentukan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan khususnya kepada penduduk rentan adminduk Masyarakat Kampung Adat Sempurmayung.

1. *Strengths* (Kekuatan)

Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk rentan adminduk di Kampung Adat Sempurmayung didukung oleh beberapa faktor kekuatan utama, yaitu adanya regulasi yang jelas, inovasi pelayanan yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, ketersediaan data kependudukan yang lengkap melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat dokumen kependudukan. Kejelasan regulasi memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan sehingga menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah dalam menjamin hak identitas setiap warga negara. Keberadaan regulasi yang memadai merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan publik (Sutmasa 2021). Selain itu, inovasi pelayanan seperti Program Sapa Warga dan Program Perekaman KTP-el Kendaraan Bermotor (Predator) menjadi strategi yang efektif dalam menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan memiliki keterbatasan akses terhadap layanan publik. Inovasi pelayanan publik terbukti mampu meningkatkan aksesibilitas, efektivitas, dan kualitas

layanan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat yang berada di daerah terpencil (Pratama and Fanida 2022).

Kekuatan lainnya terletak pada tersedianya data kependudukan yang terintegrasi melalui SIAK yang mendukung proses pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Di sisi lain, meskipun tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan administrasi kependudukan masih bervariasi, kondisi tersebut menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan literasi administrasi melalui sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa kegiatan edukasi dan pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap suatu program atau kebijakan pemerintah (Vinci, Indonesia, and Bachtiar 2022). Secara keseluruhan, kekuatan-kekuatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan administrasi kependudukan di Kampung Adat Sempurmayung didukung oleh kombinasi antara kepastian regulasi, inovasi pelayanan, ketersediaan data yang terintegrasi, serta meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan sebagai instrumen pemenuhan hak sipil dan akses terhadap berbagai layanan publik.

2. *Weaknesses* (Kelemahan)

Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk rentan adminduk di Kampung Adat Sempurmayung masih menghadapi sejumlah kelemahan yang memengaruhi efektivitas pelayanan. Pertama, keterbatasan aksesibilitas akibat letak geografis yang terpencil, kondisi jalan yang kurang memadai, serta minimnya sarana transportasi umum menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam menjangkau pusat pelayanan administrasi kependudukan. Kondisi ini menimbulkan biaya tambahan, kehilangan waktu kerja, dan menurunkan intensitas masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Aksesibilitas wilayah menjadi faktor penting yang mempengaruhi kualitas dan pemerataan pelayanan publik, khususnya di daerah perdesaan dan wilayah terpencil (Putra and Kurniawan 2022). Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, yaitu kurang memadainya perangkat teknologi informasi, jaringan internet yang tidak stabil, serta gangguan pasokan listrik, menjadi hambatan dalam penerapan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. Ketersediaan infrastruktur teknologi merupakan prasyarat penting dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat (D. P. Sari and Nugroho 2023). Ketiga, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai prosedur, persyaratan, dan manfaat administrasi kependudukan masih menjadi kendala yang cukup signifikan. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan sebagian masyarakat menganggap pengurusan dokumen kependudukan sebagai proses yang rumit dan memakan waktu sehingga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak administrasi kependudukan (A. Prasetyo and Hidayah 2021). Keempat, belum meratanya kemampuan digital masyarakat turut menghambat pemanfaatan layanan administrasi kependudukan berbasis elektronik, termasuk Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kesenjangan literasi digital terutama terjadi pada kelompok usia lanjut dan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Literasi digital yang rendah dapat menghambat pemanfaatan layanan publik digital serta memperlebar kesenjangan akses pelayanan antara kelompok masyarakat (Kurniati and Baroroh 2023). Kelima, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, baik di tingkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun pemerintah desa, menjadi hambatan dalam optimalisasi pelayanan. Ketidaksesuaian kompetensi aparatur dengan bidang tugas, keterbatasan jumlah petugas, serta koordinasi yang belum optimal antarinstansi menyebabkan pelayanan jempot bola belum dapat menjangkau seluruh masyarakat secara maksimal. Kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi pelayanan

publik dan transformasi birokrasi di sektor pemerintahan (Mulyani and Santoso 2022).

3. *Opportunities* (Peluang)

Peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat bagi penduduk rentan adminduk di Kampung Adat Sempurmayung, yang pertama adalah adanya dukungan program pemerintah desa yang secara aktif mendorong kepemilikan dokumen kependudukan. Program seperti Minggon Desa, pelayanan door to door, kerja sama penerbitan akta kelahiran dengan fasilitas kesehatan, serta penyediaan operator administrasi kependudukan di tingkat kecamatan menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dan Disdukcapil dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat. Selain itu, penerapan dokumen kependudukan sebagai persyaratan untuk mengakses layanan publik lainnya turut mendorong masyarakat untuk melengkapi dokumen kependudukannya. Strategi pelayanan jemput bola tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan akses kelompok rentan dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil terhadap layanan administrasi kependudukan (Novita & Tristiana, 2022). Peluang kedua adalah tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan. Pemerintah Desa Cimarga secara aktif memfasilitasi pengurusan dokumen dengan membantu pengumpulan dan penyampaian berkas ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. Dukungan masyarakat terlihat melalui partisipasi dalam kegiatan sosialisasi, pendataan, serta keterlibatan dalam program pelayanan jemput bola seperti Predator dan Sapa Warga. Kesadaran kolektif ini menjadi modal sosial yang penting dalam mempercepat cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, terutama bagi kelompok masyarakat adat dan penduduk rentan. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program administrasi kependudukan sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah lokal dalam membangun kesadaran hukum serta kesadaran administrasi kependudukan masyarakat (Nurismaeni, Jamalong & Khaer, 2025). Peluang ketiga adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap urgensi dokumen kependudukan sebagai sarana memperoleh hak-hak sipil dan layanan publik. Masyarakat memahami bahwa kepemilikan dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), KTP-el, akta kelahiran, dan dokumen pencatatan sipil lainnya sangat penting untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, maupun partisipasi dalam proses demokrasi. Tingginya kepemilikan KK dan KTP-el menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap dokumen dasar sudah cukup baik. Secara keseluruhan, peluang berupa dukungan program pemerintah desa, meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat, dan tumbuhnya pemahaman mengenai pentingnya dokumen kependudukan merupakan modal strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di Kampung Adat Sempurmayung. Optimalisasi peluang tersebut perlu didukung oleh sosialisasi yang berkelanjutan, penguatan layanan jemput bola, serta peningkatan akses terhadap layanan administrasi kependudukan berbasis digital.

4. *Threats* (Ancaman)

Pelayanan administrasi kependudukan di Kampung Adat Sempurmayung meskipun telah memiliki berbagai kekuatan dan peluang, namun terdapat sejumlah ancaman yang berpotensi menghambat efektivitas dan keberlanjutan layanan apabila tidak dikelola secara tepat. Ancaman pertama adalah masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap dokumen kependudukan dalam bentuk fisik. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital, keterbatasan akses teknologi informasi, serta belum optimalnya implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di tingkat masyarakat. Akibatnya, ketika dokumen fisik seperti KTP-el, Kartu Keluarga (KK), atau akta pencatatan sipil hilang atau rusak, masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai layanan publik karena harus menempuh jarak yang jauh untuk melakukan penggantian atau pembaruan dokumen. Situasi ini menunjukkan bahwa transformasi digital administrasi kependudukan masih menghadapi

tantangan berupa kesenjangan digital (*digital divide*), terutama di wilayah perdesaan dan komunitas adat. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi faktor utama yang menghambat adopsi layanan administrasi kependudukan berbasis digital di masyarakat pedesaan (B. Prasetyo and Huda 2023). Ancaman kedua berkaitan dengan keamanan dan perlindungan data pribadi penduduk. Digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan meningkatkan efisiensi pelayanan, namun pada saat yang sama menimbulkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi apabila sistem keamanan informasi tidak dikelola secara memadai. Data kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, tanggal lahir, dan data biometrik merupakan data strategis yang rentan terhadap penyalahgunaan untuk kepentingan penipuan, pemalsuan identitas, maupun kejahatan siber lainnya. Risiko tersebut menjadi semakin besar pada masyarakat yang memiliki tingkat literasi digital rendah sehingga belum memahami pentingnya perlindungan data pribadi. Menurut penelitian mengenai tata kelola data kependudukan digital di Indonesia, perlindungan data pribadi menjadi aspek krusial dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah dan memerlukan penguatan regulasi serta sistem keamanan siber yang memadai (E. P. Sari and Nugroho 2023). Ancaman ketiga adalah keterbatasan anggaran pelayanan administrasi kependudukan, terutama di tengah kebijakan efisiensi belanja pemerintah daerah. Keterbatasan anggaran dapat berdampak pada berkurangnya frekuensi pelayanan jemput bola, minimnya pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, terbatasnya pelatihan bagi aparatur desa, serta rendahnya dukungan operasional bagi petugas lapangan. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan pelayanan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan komunitas adat seperti Kampung Adat Sempurmayung. Selain itu, keterbatasan anggaran juga berpengaruh terhadap kesejahteraan tenaga honorer yang terlibat dalam pelayanan administrasi kependudukan, sehingga dapat memengaruhi motivasi dan kualitas pelayanan. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya, terutama dukungan anggaran yang berkelanjutan dan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas layanan publik (Nugraha and Suharyanto 2022). Secara keseluruhan, ancaman terhadap pelayanan administrasi kependudukan di Kampung Adat Sempurmayung meliputi ketergantungan masyarakat terhadap dokumen fisik, risiko keamanan data pribadi, dan keterbatasan anggaran pelayanan. Ketiga faktor tersebut dapat menghambat perluasan akses dan keberlanjutan layanan administrasi kependudukan apabila tidak diantisipasi melalui peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan sistem perlindungan data pribadi, serta dukungan anggaran yang berkesinambungan untuk pelayanan administrasi kependudukan di wilayah adat dan terpencil.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, langkah selanjutnya adalah menyusun strategi untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang sekaligus meminimalkan kelemahan dan ancaman dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kampung Adat Sempurmayung sebagai berikut:

1. Strategi S-O (*Strengths–Opportunities*) difokuskan pada pemanfaatan kekuatan yang dimiliki untuk menangkap peluang, melalui penguatan kerja sama antara Pemerintah Desa Cimarga dan Disdukcapil Sumedang dalam mengintegrasikan layanan administrasi kependudukan ke dalam program desa, optimalisasi pelayanan jemput bola berbasis data terintegrasi untuk menjangkau kelompok rentan, serta penyusunan Peraturan Desa tentang kewajiban kepemilikan dokumen kependudukan sebagai dasar penguatan kepatuhan administrasi masyarakat.
2. Strategi W-O (*Weaknesses–Opportunities*) diarahkan untuk mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia. Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan literasi administrasi kependudukan dan literasi digital masyarakat melalui program sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan, serta pembentukan pusat

bantuan layanan berbasis komunitas kampung adat guna mengatasi keterbatasan akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

3. Strategi S-T (*Strengths-Threats*) bertujuan menggunakan kekuatan yang ada untuk menghadapi ancaman. Strategi ini dilakukan melalui percepatan digitalisasi layanan administrasi kependudukan guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap dokumen fisik, disertai sosialisasi yang masif mengenai penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Selain itu, diperlukan penguatan perlindungan data pribadi melalui kebijakan dan aturan teknis di tingkat lokal yang membatasi akses terhadap data kependudukan serta memperkuat tanggung jawab petugas pelayanan.
4. Strategi W-T (*Weaknesses-Threats*) difokuskan pada upaya meminimalkan kelemahan sekaligus menghindari ancaman. Langkah yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal melalui pelatihan kader kependudukan di tingkat desa dan kampung adat, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran desa untuk penyediaan sarana pendukung pelayanan seperti komputer, printer, dan jaringan internet. Di samping itu, diperlukan kerja sama antara Disdukcapil dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang untuk memperkuat infrastruktur jaringan komunikasi sehingga pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis SWOT menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga, penguatan kapasitas masyarakat dan aparatur, pemanfaatan teknologi digital, perlindungan data pribadi, serta dukungan sumber daya yang memadai guna meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat Kampung Adat Sempurmayung.

E. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dianalisis menggunakan SWOT, diidentifikasi sejumlah kekuatan, yaitu adanya regulasi yang jelas, inovasi layanan seperti Program Sapa Warga dan Predator, serta ketersediaan data kependudukan yang relatif lengkap dan terintegrasi. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan berupa sulitnya akses menuju lokasi pelayanan, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai administrasi kependudukan, belum meratanya literasi digital, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Di sisi lain, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan, yaitu dukungan program Desa Cimarja dan meningkatnya kesadaran individu maupun kolektif masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan secara lengkap. Adapun ancaman yang dihadapi meliputi ketergantungan masyarakat terhadap dokumen fisik, risiko kebocoran data pribadi, serta keterbatasan anggaran pelayanan.

Secara keseluruhan, faktor kelemahan dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kampung Adat Sempurmayung mencakup aspek geografis, infrastruktur, literasi administrasi dan digital masyarakat, serta kapasitas sumber daya manusia. Kelemahan-kelemahan tersebut perlu menjadi perhatian dalam perumusan strategi peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan. Untuk peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk rentan adminduk memerlukan penguatan strategi jemput bola yang berkelanjutan, pendekatan yang adaptif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat, pemanfaatan data yang lebih akurat, peningkatan komunikasi pelayanan, serta kolaborasi yang lebih efektif antar pemangku kepentingan guna mewujudkan pelayanan yang inklusif, responsif, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, K. R. (1971). *The Concept of Corporate Strategy*. USA: Richard D. Irwin, Inc.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Dwiyastira, M. B., & Gatningsih, G. (2024). *Pelayanan Dokumen Kependudukan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepada Penduduk Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Batanghari* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Kurniati, D., & Baroroh, S. (2023). Literasi Digital Masyarakat Dalam Mendukung Transformasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 21(1), 45-58.
- Mulyani, E., & Santoso, B. (2022). Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik* 18(2): 120–34.
- Mulyanto, A. K., Kadir, A., & Isnaini, I. (2018). Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1).
- Novita, H. V., & Tristiana, E. (2022). Percepatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Melalui Program Jemput Bola di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Kajian Administrasi dan Sosial Terapan*, 1(1).
- Nugraha, A., & Suharyanto, A. (2022). Capacity and Resource Constraints in Public Service Delivery: Evidence from Local Government Administration in Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 135-149.
- Nurisnaeni, Jamalong, A., & N. Khaer, N. (2025). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Dokumen Administrasi Kependudukan. *Jurnal Tomalebbi*, 12(3).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- Prasetyo, A., & Hidayah, N. (2021). Pengaruh Sosialisasi Kebijakan Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan. *Jurnal Administrasi Negara*, 27(3).
- Prasetyo, B., & Huda, M. (2023). Digital Divide and Public Service Transformation in Rural Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 20(1).
- Pratama, R. A., & Fanida, E. H. (2022). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Publika*, 10(4).
- Pratama, Y. R. (2023). *Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin Terhadap Suku Anak Dalam* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Putra, R. F., & Kurniawan, T. (2022). Aksesibilitas Pelayanan Publik pada Masyarakat Wilayah Terpencil: Tantangan dan Strategi Pemerataan Layanan. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 26(2).
- Sari, D. P., & Nugroho, R. (2023). Infrastruktur Teknologi Informasi dan Transformasi Digital Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 19(1).
- Sari, E. P., & Nugroho, Y. (2023). Data Governance and Personal Data Protection in Digital Population Administration Services. *Jurnal Bina Praja*, 15(3), 421–34.
- Sihombing, B. (2021). Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat di Daerah Terpencil. *Jurnal Administrasi Publik* 17(2): 101–15.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan efektivitas implementasi kebijakan publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25-36.
- Syadzily, T. A. H., & Mulazid, A. S. (2025). Analysis of Alternative Social Protection Policies in Indonesia: A Systematic Review of Resilience, Digitalization, and

- Governance (2020-2025). *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 14(2), 1-12.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- United Nations Development Programme. (2021). *Legal Identity for Inclusive Development*. New York: UNDP.
- Vinci, A., & Bachtiar, H. (2022). Pengaruh Edukasi Terhadap Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Dalam Program Pelayanan Publik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(5).
- World Bank. (2021). *ID4D Global Dataset: Identification for Development*. World Bank.
- Yanti, O. (2024). Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Kependudukan Bagi Penduduk Rentan: Studi Suku Anak dalam di Bungo (Studi pada Suku Anak dalam di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi). *Jurnal Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 202-220.